

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada penelitian ini dan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dan setelah dilakukan analisis oleh penulis, maka dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau menunjukkan perkembangan investasi asing di Provinsi Riau mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Hal ini disebabkan karena perlindungan hukum terhadap penanam modal asing sangat kurang diperhatikan baik itu melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah atau dari segi keamanan sehingga investor asing harus berhati-hati dan memikir dua kali apabila ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Karena menciptakan kepastian hukum terhadap penanaman modal asing di daerah Provinsi Riau sebagai bentuk perlindungan hukum sangat penting dilakukan mengingat perubahan yang terjadi dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia seperti Provinsi Riau juga timbul masalah-masalah baru terhadap proses penanaman modal asing dalam bentuk pelanggaran dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh sebagian masyarakat daerah seperti perampasan terhadap aset-aset perusahaan yang mengakibatkan Provinsi

Riau tidak aman untuk berinvestasi. Pelaksanaan investasi atau penanaman modal di Provinsi Riau telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, akan tetapi secara praktek dilapangan pada umumnya belum berjalan secara efektif, hal ini disebabkan banyaknya kendala yang ditemukan karena tingkat kepedulian pemerintah dalam menangani berbagai keluhan terhadap pelayanan yang kurang optimal dan prosedurnya di anggap berbelit-belit oleh investor.

2. Banyaknya Kendala dalam penanaman modal di Provinsi Riau yaitu masalah jalur birokrasi, yang terkesan terlalu berbelit-belit serta tidak adanya transparansi dan kepastian hukum bagi calon investor karena aspek resiko dari menanam modal yang sangat diperhatikan oleh para investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Maka pemerintah Provinsi Riau akan berusaha kembali menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau dengan cara akan menyiapkan paket insentif yang terdiri dari paket stimulasi fiskal dan non fiskal karena bagi pemerintah daerah peranannya dalam memberikan stimulasi non fiskal akan sangat menentukan daya saing daerah, insentif non fiskal harus diberikan semenarik mungkin dan dapat dalam bentuk insentif khusus serta menyiapkan infrastruktur seperti fasilitas jalan, air bersih, listrik dan sebagainya.

B. Saran

Mengingat bahwa perlunya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian hukum terhadap investasi asing, maka pemerintah Provinsi Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus meningkatkan lagi iklim investasi yang kondusif. Adapaun saran-saran dari penulis adalah:

1. Pemerintah Provinsi Riau harus lebih meningkatkan lagi perannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, tanpa adanya perbedaan terhadap para investor, baik penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung masuknya investasi ke daerah dan kebijakan yang memudahkan investor yang sudah ada di daerah. Pemerintah daerah Provinsi Riau juga harus mengoptimalkan potensi yang ada di daerah dengan memperbaiki sumberdaya lingkungan daerah.
2. Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada investor selaku penyelenggara penanaman modal dengan menciptakan birokrasi yang efisien, biaya ekonomi yang ringan, serta iklim usaha yang kondusif dalam keamanan berusaha.
3. Diharapkan antar instansi-instansi pemerintah, dapat bersinergi dalam menjalankan amanat Undang-undang.
4. Dan diharapkan kepada investor untuk dapat mengetahui dan memahami undang-undang penanaman modal, sehingga dapat mengajukan sesuai prosedur yang berlaku.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.